

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah komponen yang sangat penting untuk mengembangkan potensi warga negara untuk mengukur kemajuan suatu negara, karena pendidikan merupakan bekal untuk kemajuan generasi penerus dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, pendidikan akan mampu dalam menyiapkan dan mengasah pendidik yang kompeten dan terus berkembang untuk meningkatkan potensi pengetahuan yang merupakan pusat pendidikan agar mampu mencetak generasi milenial yang kolaboratif, inovatif dan kreatif. Serta pendidikan juga harus tersruktur dan memiliki ketentuan yang jelas dimana prosesnya terdiri dari memiliki persiapan yang kompeten, tujuannya tepat sasaran, kebijakan yang terintergrasi, koordinator bersifat tersruktur, serta pengawasan harus disiplin dan terarah. Dalam pencapaian berhasil tidaknya suatu pendidikan, maka perlu adanya suatu kebijakan yang melibatkan berbagai pihak yang ada, karena sekecil apapun pihak tersebut tetap memiliki peran penting dalam membuat suatu kebijakan.

Pendidikan sebagai bekal hidup agar manusia dapat memanfaatkan waktu mengejar perkembangan setiap zaman sehingga tidak adanya perbedaan antara kenyataan dan idealitas (Maryam & Gainau, 2019). Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan yaitu negara memiliki tugas penting salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan anak bangsa.

Dunia pendidikan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Berbagai faktor dan kondisi menyebabkan terganggunya dan ketidakstabilan pendidikan, adanya pandemi Covid-19 adalah salah satu faktornya. Pandemi telah menghambat situasi pendidikan, terutama situasi pembelajaran yang bermasalah dan tidak maksimal dalam proses pembelajaran (*Learning Loss*). Menurut (Andriani dkk., 2021), Di masa pandemi ini memaksa 1,7 miliar peserta didik mengalami pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung dan menemui berbagai kendala dan hambatan dalam proses pembelajaran. *Learning Loss* mengakibatkan hilangnya komunikasi antara pendidik dan peserta didik yang aktif berkolaborasi dalam pembelajaran dikelas. Permasalahan tersebut yang harus diatasi dan dipecahkan serta diselesaikan melalui kebijakan dan membutuhkan solusi yang strategis. Pendapat ini didukung langsung dengan hasil survey sementara yang menemukan bahwa masa covid-19, pembelajaran daring tidak terlalu efektif dalam mendukung pembelajaran.

Tilaar dan Riant (2008) mengatakan, bahwa kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perencanaan langkah-langkah strategis pendidikan melalui visi dan misi pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Melihat hal ini, pemerintah terus mengembangkan kebijakan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi pada masa pandemi yang mengarah pada karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Maka dari itu, kebijakan kurikulum merdeka sebagai pengembangan dari pada Kurikulum-13 yang dikeluarkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mencapai tingkat keberhasilan suatu pendidikan, maka penting adanya suatu kebijakan untuk mengukur kualitas serta potensi peserta didik yang melibatkan pemangku kepentingan, karena sekecil apapun pihak tersebut jelas memegang peranan yang sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Hal utama yang menjadi dasar mengapa pentingnya penerapan kurikulum merdeka ini karena dapat merevitalisasi sistem pendidikan untuk membangun kompetensi utama agar kegiatan belajar menjadi menyenangkan. Pada kategori kurikulum, merdeka belajar membentuk kurikulum berdasarkan kompetensi, fokus kepada soft skill dan pengembangan karakter. Selain itu dalam kurikulum merdeka belajar guru dan siswa diberikan kepercayaan secara penuh dalam proses pembelajaran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, mengenai ketentuan umum butir 6 menyatakan, bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan berpartisipasi dalam berlangsungnya proses pendidikan. Maka dari itu, seseorang pengajar dapat di percaya sebagai pendidik. Dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar di kelas, semua peserta didik pastinya membutuhkan tenaga pendidik untuk membantunya dan membimbing dalam proses tumbuh kembang peserta didik, menjadikan peserta didik yang berpotensi dan cakap. Karena tidak ada pendidik, peserta didik tidak dapat sepenuhnya mencapai tujuan hidupnya.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu menciptakan output (lulusan) yang berkualitas, kreatif dan inovatif sehingga sekolah dapat bersaing di dunia luar, serta menjadikan lembaga pendidikan tersebut bermutu. Untuk

menghasilkan lembaga pendidikan yang bermutu tersebut, maka di perlukan prinsip-prinsip manajemen dalam bidang kurikulum agar hasilnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Peranan manajemen sangat signifikan dalam menentukan kualitas sebuah lembaga pendidikan. Karena bidang garapannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pemberdayaan sumber daya yang ada. Dengan begitu pendidikan tidak akan berhasil tanpa diatur sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing secara efektif.

Pendidikan dipandang sebagai investasi dalam peningkatan kualitas anak bangsa. Untuk meraih tujuan pendidikan tersebut, dengan adanya suatu rencana atau program yang disebut dengan kurikulum. Istilah kurikulum dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

Dengan upaya tersebut diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan satuan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan kurikulum memiliki peranan sangat penting dalam pendidikan. Secara umum, kurikulum adalah himpunan atau sistem perencanaan dan pengaturan tentang konten dan materi pembelajaran yang berpedoman pada proses belajar mengajar. Kegiatan tanpa kurikulum sebagai rencana, maka pembelajaran akan terjadi tidak efektif. Berdasarkan pengertian mengenai kurikulum diatas, manajemen kurikulum menunjuk pada fungsi-fungsi manajemennya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Selama terjadinya wabah pandemi ini, tidak menyurutkan antusias pemerintah untuk melakukan inovasi kurikulum, pemerintah melalui Kemdikbud Ristek, memperkenalkan kurikulum prototipe sebagai salah satu pilihan untuk satuan pendidikan dalam melakukan pemulihan pembelajaran selama periode tahun 2022-2024. Kebijakan kurikulum Nasional berdasarkan penilaian yang dilakukan pada masa pemulihan pembelajaran akan direvisi pada tahun 2024. Kurikulum merdeka tentunya ditawarkan sebagai alternatif bagi lembaga Pendidikan yang bersedia melakukannya (Rosmana dkk., 2022).

Dalam pelaksanaannya tidak diterapkan secara seragam pada semua jenjang di setiap lembaga pendidikan. Ini untuk mengevaluasi pro dan kontra. Kurikulum ini digunakan inovasi baru untuk mendukung kualitas Pendidikan yang menurun pada saat pandemi. Kualitas yang diharapkan tidak hanya dalam *output*, tetapi mendapatkan *outcome* yang dapat berguna bagi masyarakat dan dunia.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022 telah mengeluarkan kurikulum prototype yang dikembangkan sebagai kurikulum merdeka. Penerapan pendidikan karakter melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila menjadi hal khusus dalam kurikulum merdeka yang merupakan pembelajaran untuk mengkaji dan merefleksi serta memecahkan masalah di sekitarnya.

Namun fakta pelaksanaan di lapangan menjelaskan bahwa penerapan dari kebijakan kurikulum merdeka tentunya terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi pendidik dan peserta didik. Salah satunya adalah proses pembelajaran yang pasti mengalami perubahan yang signifikan, dimana pendidik dituntut untuk

mampu memaksimalkan proses kegiatan belajar mengajar dan teruntut pendidik sudah memiliki buku sedangkan peserta didik belum diberikan buku sehingga peserta didik masih memakai buku kurikulum-13 dan pendidik juga belum memahami sepenuhnya mengenai kurikulum merdeka serta kurangnya pelatihan dan interaksi pendidik dalam sosialisasi upaya menerapkan kurikulum merdeka ini.

Penelitian ini merupakan penelitian baru yang membahas tentang hal ini, akan tetapi penulis menemukan beberapa artikel dan jurnal penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul skripsi diantaranya dalam penelitian (Rofiq & Arifin, 2021), menjelaskan bahwa pelaksanaan kurikulum darurat tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan kurangnya fasilitas serta kurangnya pemahaman tentang IT dari pendidik dan peserta didik, sedangkan menurut Supriatna (2021), menggambarkan kurikulum darurat yang dilaksanakan mendekati standar dan kegiatan pembelajaran utama masih sangat jauh dari standar yang mempengaruhi efektifitas pembelajaran daring di madrasah ibtidaiyah.

Situasi saat ini menggambarkan bahwa penerapan kebijakan kurikulum merdeka tidak begitu optimal dalam melaksanakan pembelajaran yang telah disahkan. Penerapan kebijakan kurikulum merdeka terdapat kendala seperti minimnya pelatihan, sosialisasi dan workshop yang dilaksanakan pendidik dalam menerapkan kebijakan kurikulum merdeka ini. Oleh karena itu, agar dalam menerapkan kebijakan kurikulum merdeka dapat berjalan secara optimal, perlunya sosialisasi mengenai kebijakan kurikulum merdeka ini diadakan serta menyediakan pelatihan khusus pendidik sebagaimana tercantum pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuno., dkk 2020).

SMP Negeri 25 Kota Jambi merupakan sekolah yang melaksanakan penerapan kebijakan kurikulum merdeka secara langsung dan dalam menerapkan kebijakan kurikulum merdeka tentu sudah dijalankan untuk warga sekolah mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan seluruh bagian warga sekolah di SMP Negeri 25 Kota Jambi. Terutama kepada tenaga pendidik yang menjadi peran inti dalam proses pembelajaran, memiliki kendala dan tantangan baik dalam proses pembelajaran maupun banyak perubahan yang tak terduga dalam penerapan kebijakan kurikulum merdeka oleh SMP Negeri 25 Kota Jambi dan sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya berdasarkan kesiapannya dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Sesuai opsi pilihan dan hasil pendataan Kemendikbud Ristek, SMP Negeri 25 Kota Jambi pada tahun ajaran 2022/2023 ini menjadi salah satu peserta dari sekolah mandiri berubah sesuai dengan hasil rapat bersama guru.

Berdasarkan observasi awal yang membahas tentang penerapan kebijakan kurikulum merdeka di SMP Negeri 25 Kota Jambi adalah bahwa pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka ini terdapat adanya hambatan dan tantangan yang dirasakan oleh SMP Negeri 25 Kota Jambi dalam penerapannya mengalami perubahan yang signifikan khususnya saat proses kegiatan belajar mengajar. Salah satunya sebagai Kepala Sekolah dalam melakukan perencanaan adalah membuat jadwal pembinaan kepada semua guru terkait materi-materi penting di Kurikulum Merdeka. Pembinaannya sebelum masuk tahun pelajaran baru. Pembinaan dilakukan di luar jam mengajar sehingga harus mengorbankan sedikit hari libur guru dan dari segi pelaksanaan dalam pembelajaran di kelas sebagian guru menggunakan metode

ceramah di kelas yang pastinya membuat siswa jenuh, masih menjadi objek dalam belajar hingga mereka kurang kreatif karena proses KBM (kegiatan belajar mengajar) masih di dominasi guru, anak-anak sibuk mengerjakan berbagai tugas yang diberikan guru termasuk PR, dan sumber belajar yang digunakan di kelas masih sangat terbatas, umumnya baru memanfaatkan buku paket saja sehingga siswa kurang peluang untuk mencari bahan dari berbagai sumber selain buku paket.

Oleh karena itu, urgensi perlunya penelitian ini sebagai pemulihan pembelajaran pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Pemulihan yang dimaksud adalah dampak pandemi yang sedang mewabah di Indonesia hingga berdampak pada seluruh institusi dan proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Kemendikbud Ristek memberi pilihan kepada lembaga pendidikan untuk menentukan kurikulum merdeka antara dua kurikulum yang lainnya, ialah kurikulum darurat dan kurikulum 2013 dan penerapan kebijakan kurikulum merdeka ini diharapkan dapat mewujudkan iklim belajar yang kondusif setiap individu dengan segala keunikannya masing-masing tanpa bermaksud untuk menyeragamkannya.

Dengan demikian, sangat diperlukan adanya potensi dalam proses menganalisis berbagai komponen-komponen dasar dalam kurikulum sehingga dapat mempengaruhi pembelajaran secara optimal. Paradigma kurikulum merupakan cara untuk memandang perubahan yang terjadi terhadap sistem pendidikan melalui proses pembelajaran di sekolah saat ini.

Atas dasar fenomena diatas, penulis melakukan penelitian berfokus penelitian yaitu melihat bagaimana penerapan kebijakan kurikulum merdeka, maka penulis

mengajukan judul **“PENERAPAN KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI SMP NEGERI 25 KOTA JAMBI”**. Penulis memilih suatu lembaga pendidikan yaitu SMP Negeri 25 Kota Jambi dengan partisipannya berjumlah 8 orang yaitu Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, 3 pendidik dan 3 peserta didik di SMP Negeri 25 Kota Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kebijakan kurikulum merdeka dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi di SMP Negeri 25 Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam penerapan kebijakan kurikulum merdeka di SMP Negeri 25 Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kurikulum merdeka dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi di SMP Negeri 25 Kota Jambi.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam penerapan kebijakan kurikulum merdeka di SMP Negeri 25 Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kedepannya baik yang bersifat teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman teruntuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk mengetahui penerapan kebijakan kurikulum merdeka dan mengetahui kendala dalam penerapan kebijakan kurikulum merdeka.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi panduan bagi pendidik dalam menerapkan proses pembelajaran secara efektif dan inovatif untuk semangat berkinerja lebih maju pada masa pemulihan dari keadaan pada pandemi covid-19.
- b. Bagi kepala sekolah, dapat digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan kebijakan kurikulum merdeka yang efektif dan berjalan dengan sesuai dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan.
- c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat membantu kepada kepala sekolah untuk menjadi salah satu kajian atau telaah, terutama mengenai penerapan kebijakan kurikulum merdeka dilembaga pendidikan dan dapat menjadi referensi bagaimana solusi teruntuk dalam penerapan kebijakan kurikulum merdeka dapat diimplementasikan secara efektif dan benar di masa yang akan datang.
- d. Bagi jurusan administrasi pendidikan, menggunakan penelitian ini untuk referensi terkait dengan mata kuliah analisis manajemen kurikulum dalam mengkaji sebuah kurikulum dan cara penerapannya secara efektif dan benar.
- e. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai petunjuk referensi teruntuk pihak-pihak

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut membahas tentang kebijakan kurikulum merdeka.